

BAB IV

KEBIJAKAN YANG DILAKUKAN INDONESIA UNTUK MENINGKATKAN KEAMANAN LAUT DALAM MENCEGAH KASUS PENYANDERAAN WARGA NEGARA INDONESIA OLEH KELOMPOK ABU SAYYAF

A. Kebijakan Indonesia Dalam Praktek *Maritime Security* Untuk Memerangi Kejahatan Perompakan Laut

Setelah berhasil membebaskan 10 warga negara Indonesia yang disandera oleh Abu Sayyaf, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa pembebasan sandera yang ditawan oleh kelompok Abu Sayyaf ini memang patut disyukuri. Para sandera dapat kembali pulang dengan selamat ke keluarga masing-masing. Namun ada hal yang jauh penting yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana mencegah agar peristiwa penculikan tersebut tidak kembali terjadi (Siregar, 2016).

Meningkatnya globalisasi ditandai dengan semakin kompleksnya interaksi aktor-aktor internasional untuk menciptakan kerentetan timbal balik sehingga kerjasamainternasional semakin dibutuhkan untuk mengatasinya (Jmeadu, 2014: 109). Sebagai negara maritim yang luas, Indonesia sering mendapatkan gangguan keamanan di laut yang salah satunya adalah perompakan laut. Perompakan laut atau yang juga disebut dengan bajak laut merupakan salah satu dari isu-isu keamanan non-tradisional yang memaksa pemerintah untuk menyusun strategi keamanan serta merumuskan mekanisme pemecahan masalah melalui kerjasama dengan negara sekitar. Terlebih dengan negara-negara yang juga memiliki kepentingan atas jalur pelayaran. Sebagai isu keamanan non-tradisional, tentunya dibutuhkan kerjasama keamanan antar dua negara ataupun lebih demi menuntaskan isu tersebut.

Pada kasus perompakan laut yang dilakukan oleh Abu Sayyaf sendiri sering terjadi pada laut perbatasan seperti perairan Sulawesi-Sulu yang memiliki nilai strategis dan

digunakan untuk kepentingan banyak negara. Ribuan kapal tanker minyak dan kapal dagang melintasi jalur tersebut. Karena potensi, letak, dan intensitas aktifitas laut tersebut yang ramai membuat jalur tersebut jadi sasaran oleh kelompok Abu Sayyaf untuk melakukan aksinya. Tentunya hal ini menjadi beban tugas pemerintah Indonesia dan negara tetangga. Belum lagi antara Indonesia dan negara tetangga memiliki kepentingan ekonomi yang berbeda-beda pada perairan tersebut. Misalnya antara Indonesia dan Filipina, kebutuhan perdagangan dan batu bara dan bahan-bahan mineral lain bergantung pada laut Sulawesi dan laut Sulu. Selama ini Indonesia memasok kebutuhan batu bara Filipina hampir 96 persen. Perdagangan antara Indonesia dan Filipina sendiri mencapai USD 4,6 miliar dengan keuntungan yang didapatkan oleh Indonesia sebesar USD 3,19 miliar (Gumilang, 2016). Oleh karena itu, dalam konsep *maritime security* dijelaskan bahwa kemaanan laut dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara.

Untuk mencegah agar tidak terulang lagi kasus perompakan laut tersebut, maka perlu untuk dilakukannya sebuah kebijakan. Keijakan-kebijakan tersebut dapat berupa praktek-prakter yang ada dlama konsep *maritime security* seperti patroli, penangkapan, kegiatan terkoordinasi, dan diplomasi. Dalam kasus ini, Indonesia bersama dengan Filipina dan Malaysia berinisiatif membangun kerjasama pengamanan laut baru. Ketiga negara ini melaksanakan pertemuan trilateral pertamanya sebulan setelah terjadi tiga kasus penyanderaan warga negara Indonesia oleh Abu Sayyaf. Pertemuan ini dinamakan sebagai *The 1st Trilateral Defence Minister* yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 2016.

Pada pertemuan tersebut, Indonesia diwakilkan oleh Mentri Luar Negeri, Retno Marsudi dan Jendral Gatot Nurmantyo yang saat itu masih menjabat sebagai Panglima TNI. Lalu dari petinggi Malaysia yang hadir adalah Mentri Luar Negeri, Dato' Sri Anifah Aman dan Panglima Angkatan Bersenjata, Tan Sri Dato' Sri. Kemudian pejabat Filipina yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Mentri Luar Negeri,

Jose Rene D Amendras dan Pelaksana Tugas Panglima Militer Caesar Taccadbahwa (Kemlu, 2016).

Pada pertemuan pertama tersebut membahas isu keamanan laut di wilayah negara masing-masing. Dari pertemuan tersebut dihasilkan empat kesepakatan yang berkaitan dengan keamanan laut untuk mencegah kejahatan laut. Kesepakatan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Indonesia-Malaysia-Filipina berkomitmen untuk bekerjasama dalam berpatroli menjaga perairan dari tindak kejahatan misalnya perompakan laut.
- 2) Pembahasan tentang reaksi ketiga negara jika tindak kejahatan seperti perompakan laut masih terjadi di wilayah perairan masing-masing.
- 3) Ketiga negara saling tukar-menukar informasi secara cepat dalam situasi darurat, misalnya dengan membuat *hotline* saluran informasi atau pengaduan demi meningkatkan koordinasi bantuan untuk orang atau kapal yang dalam situasi kritis serta mengintensifkan informasi dan berbagi intelijen.
- 4) Pembahasan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan detail pada setiap tahapan yang akan dibahas masing-masing Menteri Luan Negeri dan Panglima Militer.

B. Kebijakan Indonesia Dalam Mengimplementasikan *Smart Power* Untuk Meningkatkan Keamanan Laut

Indonesia dalam upayanya meningkatkan keamanan laut mencoba untuk menerapkan *smart power*. Walaupun Indonesia terlihat lebih mengedepankan upaya diplomasi, namun sebenarnya Indonesia tetap mengupayakan untuk terus meningkatkan kekuatan militernya demi mengamankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini terlihat pada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia setelah pertemuan tiga negara. Penggunaan *smart power* dalam upaya meningkatkan keamanan laut yaitu melalui cara *hard power* yang dimana menggunakan kekuatan Angkatan Laut

atau militer dan *soft power* yang dimana adalah salah satu cara untuk menggapai kepentingan dengan tanpa kekuatan Angkatan Laut atau militer.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan keamanan laut tersebut agar dapat memenuhi keselamatan maritim (*maritime safety*) yang menjamin keselamatan kapal, instansi, personil, dan juga warga negara Indonesia yang berhak untuk mendapatkan keselamatan (*human security*). Selain itu, dengan tercapainya keamanan laut maka dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan laut merupakan media yang paling sering digunakan dalam perdagangan internasional dan sumber daya perikanan.

1. Upaya Indonesia Meningkatkan Keamanan Laut Melalui *Hard Power*

Dalam ruang lingkup politik internasional, hubungan antar negara bersifat anarki. Situasi yang anarki juga mendorong aktor untuk terus mencapai kekuatan karena sistem internasional yang memandang kedaulatan sebagai sesuatu yang *absolute* yang mengarah pada terjadinya konflik adalah karena eksistensi sebuah negara adalah ancaman bagi negara lainnya (Afrimadona & Komeini, 2012: 18-19). Sehingga untuk mendapatkan sebuah keamanan (merasa aman terhadap adanya ancaman), negara perlu membangun kekuatan militernya masing-masing, baik pembangunan kekuatan militer yang bersandar pada kekuatan nasional dan aliansi sebagai bentuk dari maksimalisasi kekuatan atau implementasi strategi militer untuk mencapai makna keamanan, terutama pada keamanan maritim.

Pada upaya pemerintah Indonesia untuk memerangi kejahatan perompakan laut, dua bulan setelah diadakannya pertemuan pertama trilateral tersebut yaitu pada tanggal 14 Juli 2016, Indonesia, Malaysia dan Filipina menandatangani kerangka persetujuan baru untuk kerjasama yang disebut sebagai *The Sulu Sea Patrol Initiative* (SSPI) yang relevan dengan *Standart Operating Procedures* (SOP). Dari kesepakatan tersebut

lahirlah sebuah inisiatif untuk melaksanakan patroli terkoordinasi yang sifatnya lebih dari sekedar patroli bersama. Karena istilah “patroli bersama” menyiratkan bahwa akan dilakukan secara serentak dan dalam lintas batas nasional, sementara itu gagasan “patroli terkoordinasi” berarti setiap negara bebas untuk melakukan patroli masing-masing tanpa komando dari negara lain dalam wilayah perbatasannya sendiri dengan tetap membangun komunikasi.

Indonesia, Malaysia dan Filipina juga sepakat untuk mengizinkan personil militer untuk dapat menyebrang perbatasan jika harus mengejar para pelaku perompak laut atau teroris dengan catatan hanya dilakukan dalam keadaan darurat dan harus dilakukan dengan penyampaian informasi sebelum operasi dilakukan. Selain itu, ketiga negara juga membentuk pos komando untuk memfasilitasi koordinasi antar negara. Pos komando tersebut ditempatkan di Bongao, Filipina; Tawau, Malaysia dan Tarakan, Indonesia. Pos-pos tersebut akan digunakan untuk menunjukkan rute laut dan pengawasan udara. Kemudian ketiga negara juga menyepakati untuk melakukan latihan Angkatan Laut bersama dan implementasi sistem identifikasi otomatis (Parameswaran, 2016).

Pada awal Agustus 2016, Menteri Pertahanan dari ketiga negara kembali melakukan pertemuan dalam *The 3rd Trilateral Defence Ministers Meeting* di Bali, Indonesia. Dalam pertemuan ini ketiga Menteri Pertahanan dari masing-masing negara membahas tentang perkembangan *Framework of Arrangement* (FoA) yang berisi tentang SOP patroli trilateral. Hal ini dilakukan untuk patroli trilateral tersebut dapat segera dilaksanakan sesegera mungkin (Divianta, 2016).

Dari pertemuan ketiga tersebut, masih dilakukan beberapa pertemuan lanjutan. Salah satu yang dihasilkan dari serangkaian pertemuan trilateral sepanjang tahun 2016 adalah terbentuknya patroli maritim trilateral

Indomaphil yang diresmikan pada tanggal 19 Juni 2017 di Tarakan, Kalimantan Utara. Patroli Maritim Indomaphil ini merupakan koordinasi patroli keamanan laut bersama Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang diluncurkan untuk meningkatkan kerja sama ketiga negara dalam hal keamanan laut. Ketiga negara juga menetapkan jalur aman bagi pelayaran niaga kapal-kapal Indonesia agar terhindar dari peristiwa perompakan laut yang sama (Erdianto, 2016).

Upaya patroli maritim bersama ini didukung pula dengan diresmikannya Pusat Komando Maritim (*Maritime Command Center/ MCC*) dengan angkatan bersenjata dari Malaysia dan Filipina. MCC sendiri berada di tiga lokasi yaitu Tarakan di Indonesia, Tawau di Malaysia, dan Bangao di Filipina. Pembentukan MCC tersebut bertujuan untuk berbagi informasi dan intelegen serta memantau aktivitas di laut Sulu. dengan terbentuknya MCC, upaya untuk dapat menurunkan angka kriminalitas atau khususnya perompakan laut. Kebijakan ini dilengkapi dengan kesepakatan operasi pelatihan bersama dan patroli udara di perairan maritim dan garis pantai.

Selain itu, untuk memaksimalkan pertahanan Indonesia khususnya dalam keamanan laut maka Angkatan Laut perlu didukung dengan alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang maksimal pula. Dengan peralatan alutsista yang canggih maka akan mendukung pula kepentingan Indonesia untuk meningkatkan keamanan laut. Pemerintah dan Angkatan Laut melakukan beberapa upaya diantaranya *modernization*, *bulid up*, dan *naval deployment*. Dengan mempersiapkan sumber daya strategis dan penguatan Angkatan Laut merupakan bentuk upaya Indonesia agar tidak terjadinya lagi perompakan laut yang sering mengancam warga negara Indonesia khususnya para nelayan dan anak buah kapal.

Selain itu, pemerintah juga telah melakukan program *Minimum Essential Force* (MEF) atau standar minimum pengadaan yang telah dilaksanakan sejak era Susilo Bambang Yudhoyono. Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu mengemukakan bahwa dalam tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memenuhi 50,9 persen dari program MEF tahap kedua tersebut. Pada tahun 2015 program MEF tahap kedua mencapai 33,9 persen, kemudian pada tahun 2016 naik menjadi 42,3 persen, dan sampai laporan pada bulan Oktober 2017 program MEF tahap kedua telah mencapai 50,9 persen. Hal ini mendakan Presiden Joko Widodo beserta jajarannya perlu untuk memenuhi 49,1 persen dalam dua tahun hingga akhir pemerintahannya.

Dalam memenuhi program MEF tahap kedua tersebut, pemerintah tidak hanya dari barang impor, melainkan juga memprioritaskan produk dari industri dalam negeri. Pada tahun 2014, kontribusi industri dalam negeri dalam pemenuhan MEF sebesar 28,10 persen. Kemudian naik menjadi 36,44 persen pada 2015. Kontribusi terus meningkat pada tahun 2016 yang mencapai 44,66 persen. Hal ini membuat industri pertahanan dalam negeri berkembang, seperti PT PAL dalam pembuatan kapal selam (Wardi, 2017).

2. Upaya Indonesia Meningkatkan Keamanan Laut Melalui *Soft Power*

Selain menunjukkan upaya melalui kekuatan militer dari Angkatan Laut, negara juga mengupayakan untuk mencapai kepentingannya melalui suatu cara tanpa penggunaan kekuatan senjata atau militer. Diplomasi adalah salah satu cara untuk meyakinkan lawan akan keunggulan yang ditawarkan, tujuan dari diplomasi itu sendiri adalah selalu menghindari upaya penggunaan kekuatan senjata, begitupun juga di dalam suatu perkumpulan negara-negara sahabat dapat bekerjasama membantu terlepas dari konflik yang terjadi. Tujuan

utama peran diplomasi itu sendiri diantaranya yaitu *negotiation, manipulation, dan prestige*.

Mengingat Indonesia adalah negara yang memiliki perairan yang begitu luas, maka Indonesia sangat sering mendapatkan ancaman atau gangguan di daerah perbatasan. Atas kerawanan di daerah perbatasan tersebut, maka diplomasi maritim perlu ditunjukkan untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan, berdaulat di bidang pertahanan, dengan latar belakang geostrategi sebagai negara maritim.

Dalam upayanya untuk meningkatkan keamanan laut, Indonesia selain mengandalkan kekuatan militernya dengan bekerja sama dengan Malaysia dan Filipina dalam patoli maritim bersama Indomaphi juga mengupayakan dari sektor diplomasi. Untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas di perbatasan, Indonesia terus berupaya untuk melakukan patroli secara terkoordinasi dengan Malaysia dan Filipina. Dalam hal ini, upaya diplomasi difokuskan pada menyamakan persepsi diantara ketiga negara yang komperhensif termasuk isu tentang keamanan, keselamatan navigasi serta mengamankan alur laut dan proteksi lingkungan. Dalam konteks yang lebih mengamankan alur laut tidak hanya dari perompakan laut saja, namun dari kejahatan laut yang kainnya seperti penyeludupan dan perdagangan ilegal barang, orang dan senjata serta ancaman terorisme dan perusakan lingkungan (Sinamora, 2013: 123).

Upaya lainnya untuk menghadapi perompakan laut adalah dengan mengedepankan upaya diplomasi dalam wadah organisasi ASEAN. Indoensia sebagai salah satu negara pendiri ASEAN harus mampu untuk dapat menginisiasi penyelesaian dan pencegahan aktivitas kejahatan terorganisir yang terjadi di kawasan seperti yang telah dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf. Inisiasi tersebut dapat berupa dilpomasi preventif untuk

mencegah konflik yang jauh lebih besar di perairan Filipina Selatan. Diplomasi preventif mencakup konflik antar negara atau konflik dalam suatu negara, dengan pemerintah atau kelompok-kelompok non-pemerintah sebagai aktornya, tantangan konvensional maupun non-konvensional dan suatu rangkaian instrumen diplomatik, ekonomi dan politik (Luhulima, 2011: 285).

Selain itu, diplomasi preventif juga dapat dilakukan melalui *ASEAN Regional Forum* (ARF) yang memang pada awal mulanya sudah melakukan diplomasi preventif dengan beberapa langkah seperti membangun rasa saling percaya antara negara-negara ASEAN, yang dalam hal ini terutama Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Kemudian *norm building* dalam membina hubungan serta meningkatkan komunikasi untuk mendorong keterbukaan dan menghindari kesalahan persepsi antar negara.

Dalam implementasinya, diplomasi preventif tersebut memerlukan kesepakatan dari negara-negara yang terlibat. Seperti konflik penculikan warga negara Indonesia oleh kelompok Abu Sayyaf, akan melibatkan Indonesia dan Filipina. Dalam diplomasi preventif harus ada permintaan dari semua pihak yang terlibat untuk menjalankan metode ini. Hal ini dikarenakan diplomasi preventif tersebut masih berbenturan dengan beberapa prinsip dari negara-negara ASEAN itu sendiri yang antara lain *sovereign equality*, *territorial integrity* dan *non-interference*.

Indonesia juga melakukan diplomasi pertahanan untuk dapat meningkatkan keamanan lautnya. Strategi ini dilakukan untuk mewujudkan kepentingan nasional dan menjaga kedaulatan Indonesia. Implementasi dari diplomasi pertahanan ini yaitu dilakukannya kerjasama *intelligence exchange group* (IEG) bersama negara-negara sekitar. Hal ini merupakan wadah untuk menumbuhkan rasa saling percaya atau *confidence building measure* (CBMs) diantara negara anggota.

Dengan dilakukannya diplomasi pertahanan tersebut, maka dapat meningkatkan pula kapabilitas pertahanan (*defense capabilities*) tiap negara anggota termasuk Indonesia. Selain itu, Indonesia juga dapat meningkatkan citra (*prestise*) di mata dunia internasional sebagai negara yang kuat dan tangguh (Sinaga, 2017).

Adapun dalam kerjasama *intelligence exchange group* (IEG) memiliki dampak yang sangat positif untuk Indonesia yang diantaranya adalah dapat meningkatkan kemampuan dan kapabilitas militer pertahanan Indonesia, dapat mengurangi konflik antar negara anggota maupun non-anggota, dapat menjaga kedaulatan wilayah Indonesia, serta mempromosikan stabilitas lingkungan yang lebih kooperatif dan stabil.